

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK UMKM MELALUI PELATIHAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL USAHA

Ramon Zamora

**Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan
(UNRIKA) Batam**

LATAR BELAKANG

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja.

Di saat perbankan menghadapi kesulitan untuk mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan. Berdasarkan statistik BPS tahun 2003, UMKM (kurang lebih 42,4 juta unit) mendominasi lebih dari 90% total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan prosentase yang hampir sama. Data BPS juga memperkirakan 57% PDB bersumber dari unit usaha ini dan menyumbang hampir 15% dari ekspor barang Indonesia. Ditinjau dari reputasi kreditnya, UMKM juga mempunyai prestasi yang cukup membanggakan dengan tingkat kemacetan kredit yang relatif kecil. Pada akhir 2002, kredit bermasalah UMKM (NPL) hanya 3,9%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kredit perbankan yang mencapai 10,2%.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemberian kredit ke UMKM merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebaran risiko perbankan, sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga bank akan mempunyai margin yang cukup. Sektor ini mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun demikian, UMKM juga mempunyai karakteristik pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya ketersediaan dana pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan (*technical assistance*).

Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM di atas, upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat. Penyadaran diri merupakan satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap dalam kemiskinan dan kelemahan lainnya harus diubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal tersebut dapat menjadi lain, dan pasti tersedia alternatif-alternatif untuk mengatasinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan tekni-kteknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat.

Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi, 1988), sebagai berikut:

1. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah

hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalau pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan lokal masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

STUDI KELAYAKAN DAN PROPOSAL KREDIT

“Studi kelayakan suatu usaha adalah suatu kegiatan analisis yang cermat, sistematis dan menyeluruh mengenai faktor-faktor atau aspek yang dapat mempengaruhi kemungkinan berhasilnya (layaknya) pelaksana gagasan suatu usaha”

Studi tersebut harus membahas semua aspek yang dapat menentukan layak tidaknya gagasan usaha. Usaha yang layak tersebut harus dianalisis dari segi :

- a. Hukum, tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku.
- b. Teknis, dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
- c. Sosial ekonomi, memberi manfaat terhadap masyarakat.
- d. Finansial, menghasilkan arus kas positif yang dapat menutup semua kewajiban dan memberikan keuntungan.
- e. Manajemen, dapat dikelola dengan baik.

Penyusunan studi kelayakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang termasuk di Indonesia masih sangat jarang dilaksanakan. Hal ini disebabkan antara lain karena :

- a . Kondisi modal terbatas sedangkan biaya untuk menyusun studi kelayakan relatif tinggi.
- b . Kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya manfaat suatu studi kelayakan masih belum tumbuh dengan baik.
- c . Pengusaha masih beranggapan bahwa studi kelayakan hanya perlu untuk mengajukan dana kredit kepada bank saja.

Aspek-aspek yang penting dan menentukan terhadap kelayakan suatu rencana usaha, adalah aspek teknis produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen, aspek keuangan dan aspek lingkungan. Hasil analisis semua aspek tersebut di atas, harus sampai kepada kesimpulan kelayakan yang menyeluruh, meliputi kelayakan, sebagai berikut :

- a. Kelayakan secara teknis dan produksi
- b. Kelayakan dari aspek pasar dan pemasaran
- c. Kelayakan secara hukum
- d. Kelayakan dari aspek sosial dan ekonomis,
- e. Kelayakan dari aspek manajemen dan sumber daya manusia
- f. Kelayakan secara finansial
- g. Kelayakan dari aspek lingkungan

Dengan disusunnya kelayakan usaha tersebut maka bagi investor dapat memilih alternatif investasi dananya pada usaha yang menguntungkan. Sementara bagi perbankan sangat berguna dalam proses analisa untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan dan untuk mengetahui likuiditas usaha tersebut dikaitkan dengan kemampuan membayar hutangnya.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM

2. Terwujudnya UMKM menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki pertumbuhan yang tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional
3. UMKM yang dapat berperan maksimal dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan
4. Terciptanya bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memperkuat kedudukan UMKM dalam kompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Manfaat

a. Masyarakat dan UMKM:

- Agar masyarakat dan UMKM dapat mengetahui dan meyakini kemungkinan kelayakan rencana usahanya, sebelum dimulai pelaksanaannya.
- Agar masyarakat dan UMKM mempunyai pedoman/acuan dalam menjalankan roda usahanya, seperti alokasi dana sendiri atau pinjaman dan jadwal pengembaliannya; komponen biaya dan penerimaan yang akan diperoleh.
- Agar masyarakat dan UMKM dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan merugikan atau mengganggu jalannya perusahaan sehingga akan dapat mempersiapkan alternatif pemecahannya.
- Dapat menyusun usulan proyek untuk mendapatkan bantuan dana dari partner usaha atau lembaga keuangan.
- Bagi investor pemegang saham dapat memilih alternatif investasi dananya pada usaha-usaha yang lebih menguntungkan.

b. Lembaga keuangan (bank, perusahaan leasing) :

- Untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan
- Untuk mengetahui likuiditas dari proyek tsb, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan membayar kembali hutang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

c. Pemerintah :

- Untuk mengetahui sumbangan proyek tsb terhadap ekonomi nasional dan regional, perolehan devisa bagi negara, peningkatan penerimaan pajak, perluasan lapangan kerja, peningkatan dan distribusi pendapatan.
- Mengetahui dampak proyek terhadap sumber daya alam atau lingkungan hidup (pelestarian atau pengrusakan).

- Mendukung kebijakan pemerintah yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek, pemberian subsidi, dan keringanan lainnya serta bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan.

d. Bagi Perguruan Tinggi :

- Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat.
- Mempererat hubungan antara dunia akademis dan masyarakat, dunia usaha, khususnya UMKM,
- Membuka jalan bagi penyesuaian kurikulum yang dapat merespons tuntutan masyarakat dan dunia usaha,
- Menghasilkan masyarakat dan UMKM pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan.

2.3. Aspek-aspek dalam studi kelayakan

Aspek-aspek yang penting dan menentukan terhadap kelayakan suatu rencana usaha, adalah aspek teknis produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen, aspek keuangan dan aspek lingkungan. Hasil analisis semua aspek tersebut di atas, harus sampai kepada kesimpulan kelayakan yang menyeluruh, meliputi kelayakan, sebagai berikut :

- h. Kelayakan secara teknis dan produksi
- i. Kelayakan dari aspek pasar dan pemasaran
- j. Kelayakan secara hukum
- k. Kelayakan dari aspek sosial dan ekonomis,
- l. Kelayakan dari aspek manajemen dan sumber daya manusia
- m. Kelayakan secara finansial
- n. Kelayakan dari aspek lingkungan

TAHAPAN PELAKSANAAN STUDI KELAYAKAN

3.1. Tahap pra studi kelayakan

- 1) Tahap identifikasi

Identifikasi adalah menentukan usaha yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan perlunya studi kelayakan antara lain adalah:

- Apakah usaha termasuk dalam sektor yang potensial?
- Apakah pasar untuk sektor tersebut tidak jenuh?
- Apakah usaha tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah?
- Apakah usaha secara garis besar menguntungkan?

2) Tahap formulasi

Melakukan pra studi kelayakan dengan meneliti sejauh mana usaha tersebut dapat dilaksanakan menurut aspek teknis, aspek institusional, sosial dan eksternalitas, sebagai berikut :

a. Aspek teknis

Aspek teknis meliputi faktor produksi yang mempengaruhi usaha dan pemasaran hasil.

Faktor produksi adalah :

- Kemudahan akses terhadap lokasi usaha.
- Ketersediaan prasarana jalan, air, tenaga listrik, BBM.
- Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong.
- Ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pemasaran adalah :

- Potensi penjualan produk dan keuntungan yang dihasilkan.
- Target pasar dan fasilitas pergudangan serta pengangkutannya.

Biasanya aspek teknis tercermin dalam analisis benefit cost ratio, namun dengan analisis faktor faktor yang dijelaskan diatas sudah dapat menjadi pertimbangan apakah proyek ini harus ditolak atau studi lebih lanjut dapat dilaksanakan.

b. Aspek institusional

Aspek institusional meliputi dua hal yaitu organisasi pemerintah dan masyarakat.

- Dari segi pemerintah :

Apakah ada kebijakan yang menghambat atau memperlancar pembangunan dan kegiatan operasional proyek, misalnya izin hak guna usaha, izin bangunan dan izin penggunaan tenaga kerja (asing, wanita anak-anak).

- Dari segi masyarakat :

Bagaimana reaksi masyarakat sekitar, organisasi sosial dan buruh dapat merintang atau memperlancar pembangunan dan kegiatan operasional proyek.

Aspek institusional tidak tercermin dalam harga-harga oleh karena itu tidak dapat dianalisis dalam benefit cost, namun masalah yang dijelaskan dapat menjadi pertimbangan usaha ini ditolak atau dilanjutkan studi kelayakannya.

c. Aspek sosial

Disamping bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu produk tertentu, pendirian usaha juga mempunyai tujuan-tujuan sosial seperti tercermin dari penyerapan tenaga kerja dan penyebaran pendapatan.

d. Aspek eksternalitas

Aspek eksternalitas adalah hasil tidak langsung dan akibat sampingan proyek yang dapat memberikan efek positif (memberikan tambahan benefit) atau efek negatif (mengakibatkan kerugian masyarakat). Misalnya pendirian usaha pemotongan ayam di tempat pemukiman memberikan efek positif dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan bagi masyarakat tetapi sekaligus memberikan efek negatif karena polusi udara, air dan timbulnya penyakit bagi masyarakat sekitarnya.

Setelah mempertimbangkan aspek-aspek tersebut barulah dapat ditentukan perlu tidaknya diadakan studi kelayakan.

3.2. Tahap studi kelayakan

Hasil akhir dari pelaksanaan suatu penelitian untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu rencana usaha, harus ditempuh melalui tahapan-tahapan kegiatan yang berkesinambungan, sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan.
- b. Tahapan pengumpulan data (primer dan sekunder).
- c. Tahapan pengolahan dan analisis data.
- d. Tahapan penyusunan laporan.

3.2.1. Persiapan penelitian

Langkah atau tahapan rencana penyusunan studi kelayakan usaha, pada prinsipnya terdiri dari dua langkah atau tahapan kegiatan, yaitu :

A. Kerangka acuan penelitian (*Term of Reference*)

Kerangka acuan suatu rencana penelitian studi kelayakan usaha dibuat dalam bentuk bentuk tertulis (proposal). Kerangka acuan tersebut pada pokoknya, dapat berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas Usaha.
- b. Legalitas perusahaan, berupa dokumen surat-surat izin usaha yang sudah ada atau yang sedang diusahakan.
- c. Jenis atau macam komoditi dan produktivitas (besaran unit volume atau berat per satuan waktu) yang akan diusahakan.
- d. Dasar-dasar pertimbangan apa sehingga para pengusaha dan calon pengusaha memiliki gagasan seperti itu.
- e. Lokasi/tempat pelaksanaan usaha yang ada atau yang akan diusahakan.
- f. Gambaran permodalan dan fasilitas utama (lahan dan bangunan, dll) yang dimiliki dan rencana jumlah pinjaman atau kredit yang akan diajukan.
- g. Rencana pasar dan pemasaran atas komoditi yang dihasilkan nanti, untuk lokal (propinsi), nasional atau ekspor.
- h. Lain-lain yang berkaitan dengan usaha tersebut.

Kerangka acuan ini dijadikan pegangan atau dasar pertimbangan dan pemikiran untuk penyusunan proposal penelitian.

B. Proposal penelitian studi kelayakan

Berdasarkan kerangka acuan, Proposal tersebut harus dapat memberi gambaran selain yang diuraikan pada kerangka acuan tadi, juga memberikan gambaran mengenai :

- deskripsi proyek
- tujuan pelaksanaan studi
- ruang lingkup penugasan
- output (keluaran) yang akan dihasilkan
- metodologi dan rencana kerja
- susunan tim pelaksana studi
- jadwal waktu pelaksanaan dan dilampiri dengan daftar pertanyaan untuk responden
- data pengalaman atau kualifikasi dari perusahaan
- rencana anggaran biaya

Proposal ini disampaikan pada perusahaan sebagai sponsor untuk dipelajari dan dinilai, didiskusikan, dan dibuat kesepakatan bersama. Apabila pembiayaan penyusunan studi kelayakan ini dibantu oleh pihak tertentu maka proposal tersebut harus diberikan kepada lembaga/badan pemberi bantuan dana dan kepada pengusaha/calon pengusaha (sebagai contoh *cost sharing* dan *prefinancing* yang pernah dilaksanakan oleh SMIEP/AFP-TAU, dalam rangka bantuan teknis).

Untuk lebih jelasnya, maka proposal seyogyanya memuat hal-hal sebagai berikut:

Bab 1. PENDAHULUAN

- latar belakang perusahaan ;
- keadaan perusahaan pada saat ini ;
- penjelasan tentang timbulnya gagasan dan alasan-alasan pengembangan usaha.

Bab 2. DESKRIPSI PROYEK

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian umum atau persepsi tentang usaha yang direncanakan. Oleh sebab itu dalam bab ini akan berisi :

- informasi tentang usaha dan penjelasan terinci faktor yang relevan dengan gagasan usaha (faktor yang diperkirakan akan mendukung atau menghambat realisasi usaha).
- pandangan atau analisis umum tentang permasalahan spesifikasi dan atau isu-isu yang perlu diteliti dalam pelaksanaan studi.

Bab 3. TUJUAN PELAKSANAAN STUDI (*Objectives of Assignment*)

Penjelasan atau pernyataan tentang tujuan harus jelas, tepat dan spesifik dan bila mungkin ada pernyataan tujuan yang dapat diukur. Pokok-pokok yang perlu dikemukakan dalam tujuan adalah :

- gambaran tentang apa yang harus dicapai
- maksud atau tujuan penyelenggaraan penelitian

Bab 4. RUANG LINGKUP PENUGASAN

Ruang lingkup penugasan adalah merupakan elaborasi atau penjabaran secara rinci tentang tujuan pelaksanaan di atas, yaitu :

- secara singkat dan jelas menggambarkan bidang-bidang pekerjaan yang harus dikerjakan.
- rincian tugas hendaknya merupakan penjabaran klasifikasi dari tujuan yang diuraikan diatas.

- uraian secara spesifik tentang apa yang secara khas perlu diteliti (karena bersifat kritikal terhadap proyek).

Bab 5. KELUARAN (OUTPUT) YANG AKAN DIHASILKAN

- penjelasan secara spesifik tentang bayangan atau perkiraan keluaran (output) yang akan dihasilkan.
- penjelasan secara spesifik tentang dokumen-dokumen laporan yang akan dihasilkan.

Bab 6. METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

Menggambarkan pendekatan (approach) dalam hal memecahkan permasalahan dan pelaksanaan tugas :

- penjabaran secara sistematis dari permasalahan atau issue kedalam tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
- cara melaksanakan tugas (misalnya bagaimana cara pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dsb.).
- rincian pembagian tugas menjadi sub-tugas.
- pengelompokan tugas dan konfigurasi organisasinya (dalam hal ini belum menjelaskan tentang orangnya).

Bab 7. TIM PELAKSANA STUDI

Penjelasan tentang personalia yaitu ketua dan anggota Tim yang akan melaksanakan pekerjaan studi kelayakan ini, yaitu :

- siapa saja yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- semua tugas harus dapat dibagi habis oleh Tim pelaksana.
- rincian uraian tugas masing-masing anggota Tim.
- jelaskan mengapa staf konsultan tersebut yang cocok atau sesuai dengan pelaksanaan tugas tersebut.
- lampirkan masing-masing riwayat hidup (CV) Tim pelaksana.

Bab 8. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Menggambarkan hubungan antara tugas-tugas dengan jangka waktu pelaksanaan dari tugas tersebut (sebaiknya dilengkapi dengan bar chart atau tabel-tabel yang sesuai) :

- menunjukkan berapa lama setiap tugas akan diselesaikan ;
- memperlihatkan perkiraan kegiatan dinyatakan dengan orang per satuan waktu atau dalam “ mandays, manweeks, atau manmonths ” setiap anggota Tim pelaksana.
- memperlihatkan waktu (timing) dari output.

3.2.2. Tahapan Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dibagi menurut aspek-aspek yang menjadi acuan kelayakan suatu usaha, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Data yang akan dikumpulkan sangat tergantung pada jenis usaha, skala usaha dan produk yang dihasilkan. Ketiga faktor tersebut akan menentukan besar-kecil, jenis, jumlah data yang harus dikumpulkan, sumber data, cara pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Dengan demikian, masing-masing usaha yang akan diteliti kelayakannya akan memiliki perbedaan dalam pengumpulan datanya.

Oleh karena itu maka para analis usaha perlu memiliki pengetahuan mengenai seluk beluk usaha yang akan diteliti. Seyogyanya sebelum menentukan data apa yang akan diperlukan, pelajari terlebih dahulu seluk beluk usaha yang akan dikaji kelayakannya. Contoh beberapa jenis data untuk masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aspek teknis dan produksi

- Lokasi usaha
- Bangunan dan layout
- Bahan baku/saprotan dan bahan pembantu
- Tenaga penggerak
- Tenaga kerja
- Mesin dan peralatan
- Alat pengangkutan
- Alat komunikasi
- Fasilitas umum
- Lingkungan

b. Aspek pasar dan pemasaran

- Permintaan pasar
- Harga
- Calon pembeli
- Persaingan
- Perkiraan *Market share*
- Rantai pemasaran
- Perkiraan penjualan

c. Aspek hukum

- Ketentuan hukum yang mengatur
- Ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu akta perusahaan dan izin-izin
- Pelanggaran hukum

d. Aspek sosial ekonomi

- Kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh (agama, adat istiadat, pendapatan, norma sosial, kesehatan, pendidikan)
- Manfaat kepada masyarakat
- Manfaat terhadap perekonomian lokal, regional dan nasional (efek berganda, efek ke depan dan ke belakang)
- Penggunaan sumber dalam negeri
- Pengaruh terhadap penerimaan pemerintah
- Keterkaitan beban biaya investasi dengan kerugian masyarakat (jalan tol, jembatan penyeberangan/ferry)

e. Aspek manajemen

- Organisasi
- Tenaga teknis dan administrasi
- Tenaga manajerial
- Kemampuan dan keterampilan
- Wewenang dan tanggung jawab
- Pelatihan yang diperlukan

f. Aspek keuangan

- Jenis dan jumlah biaya investasi dan operasional
- Waktu biaya-biaya tersebut diperlukan
- Sumber dana pembiayaan
- Perkiraan jumlah produksi
- Waktu terjadinya produksi
- Perkiraan harga jual
- Jumlah pendapatan

g. Aspek lingkungan

- Dampak terhadap lingkungan
- Limbah yang beracun dan berbahaya bagi manusia, binatang dan tumbuhan
- Upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada
- Teknis produksi dan pembuangan limbah tidak menimbulkan dampak negatif

Sumber data adalah responden yang memiliki keterkaitan dengan usaha yang sedang diteliti seperti pengusaha, pedagang, perbankan, instansi pemerintah dan swasta, lembaga-lembaga penelitian, toko penjual mesin/peralatan produksi dan keperluan usaha lainnya serta nara sumber.

Ada 2 jenis data yaitu :

- Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya misalnya dari pengusaha, petani dan pedagang.
- Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan dari pihak kedua.

Jenis data tersebut diatas masih perlu dibuat rinciannya dalam suatu daftar pertanyaan untuk digunakan pada saat survey lapangan. Daftar pertanyaan dibuat sesuai dengan responden yang akan diwawancarai. Seringkali terjadi variable dan satuan-satuan teknis dalam daftar pertanyaan tidak sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga perlu dilakukan *test questionnaire*. Dari test ini dapat diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk wawancara.

Disamping daftar pertanyaan instrumen pengumpul data lainnya adalah kamera untuk membuat foto-foto dan alat perekam untuk wawancara. Selain wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung.

Jumlah sample responden pengusaha dan pedagang tidak ditentukan seperti dalam metoda sampling suatu penelitian, tetapi cukup ditetapkan secara sengaja (*purposive*) dan jumlahnya disesuaikan dengan pemenuhan informasi yang telah diperoleh. Jika pengumpulan data dilakukan oleh enumerator (pengumpul data) maka perlu dilakukan *coaching* daftar pertanyaan.

3.2.3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data adalah kegiatan yang paling berat dalam penyusunan studi kelayakan. Seringkali data yang sudah terkumpul tidak memadai sehingga perhitungan proyeksi produksi dan pendapatan, proyeksi biaya investasi dan proyeksi biaya operasional kurang rasional. Dalam analisis aspek keuangan analisis usaha harus kritis dan jeli melihat kegagalan-kegagalan hasil analisis dan melakukan kaji ulang terhadap asumsi dan parameter yang digunakan.

Misalnya, sering terjadi *double counting* dalam perhitungan biaya bahan baku atau bahan penolong; contoh dalam industri nata de coco, diperlukan *starter* (bibit : *acetobacter xilium*) yang dibeli hanya pada tahun awal. Selanjutnya pengusaha tidak perlu lagi membeli, tetapi secara periodik pengusaha harus melakukan perbanyakkan bibit, sehingga biaya yang diperlukan pada tahun berikutnya hanya biaya perbanyakkan bibit yang relatif jauh lebih murah. Jika wawancara dalam pengumpulan data atau pengamatan langsung kurang lengkap, maka informasi mengenai *starter* tersebut terlewatkan dan perhitungan biayanya menjadi keliru.

Analisis data yang digunakan dapat merupakan kombinasi dari berbagai metoda analisis tergantung pada keperluan dan ketersediaan data, seperti menggunakan analisis statistik parametrik dan non parametrik atau analisis sederhana dengan menyajikan data dalam tampilan tabulasi silang, analisis trend dan analisis kualitatif.

Khusus untuk aspek keuangan analisis data dilakukan dengan :

- Metoda diskonto adalah untuk mengukur kelayakan usaha dengan menggunakan kriteria investasi seperti IRR, NPV dan B/C ratio.
- Sedangkan metoda tanpa diskonto adalah mengukur kelayakan dengan menggunakan kriteria investasi seperti Break Even Point (BEP), Pay Back Period dan lain-lain.

3.2.4. Penyusunan Laporan

Pada umumnya laporan studi kelayakan mencakup hal-hal sebagai berikut (kerangka laporan yang lebih lengkap lihat lampiran 1) :

a. Ringkasan eksekutif

Laporan perlu dibuat ringkasan eksekutif dan disajikan di halaman depan laporan atau sesudah kata pengantar, yang menggambarkan keseluruhan isi laporan secara singkat namun memberi informasi yang lengkap. Isi dari ringkasan eksekutif adalah :

- Jenis usaha
- Dana yang diperlukan dan sumbernya
- Perkreditan yang meliputi jenis, plafon, bunga, jangka waktu dan sistem pembayaran kredit
- Kelayakan usaha yang terdiri dari umur proyek, skala usaha, sistem produksi, tingkat teknologi, proyeksi produksi, prospek pemasaran dan penjualan, aspek sosial, aspek hukum serta profit margin.
- Kriteria kelayakan usaha yaitu penilaian berdasarkan kriteria investasi B/C Ratio atau Net B/C Ratio, NPV dan IRR, Payback Period, Break Even Point, dan hasil analisis sensitivitas.

b. Gambaran umum mengenai prospek usaha

Wilayah pengembangan (lokal/nasional), jumlah dan skala usaha, trend produksi dan permintaan pasar (DN & LN) dan faktor pendukung lainnya dalam pengembangan usaha dimasa yang akan datang di wilayah lain di Indonesia.

c. Profil usaha dan profil pola pembiayaan

Dalam profil pengusaha perlu informasi mengenai identitas pengusaha, riwayat/perkembangan usahanya, jenis dan skala usaha, sifat usaha (individu, kelompok, kemitraan), perizinan, jaminan, teknis produksi, ketenagakerjaan dan pengupahannya, factor-faktor yang dapat mendorong pengembangan usaha ini dari segi teknis produksi dan pembiayaan melalui kredit.

Dalam pola pembiayaan perlu informasi riwayat hubungan nasabah dengan bank, syarat dan prosedur kredit bank, faktor penting dalam analisa kredit oleh bank pelaksana, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses perkreditan, kendala yang dihadapi pengusaha dan bank untuk pembiayaan usaha tersebut dan cara penyelesaiannya.

d. Aspek pasar dan pemasaran

Permintaan dan penawaran produk secara lokal dan nasional/ekspor, persaingan dan peluang pasar, harga dan sistem pembayaran penjualan hasil termasuk *bargaining position* dari pengusaha, sistem distribusi produk melalui lembaga pemasaran dan marketing margin dari pengusaha sampai lembaga pemasaran, konsumen (siapa, selera dan promosi produk), kendala yang dihadapi pengusaha dalam pemasaran dan cara penyelesaiannya.

e. Aspek teknis dan produksi

Persyaratan teknis lokasi dan administrasi usaha, supplier dan penyediaan bahan baku dan sistem pembayarannya, teknologi produksi, konstruksi bangunan dan fasilitas yang diperlukan, jadwal kegiatan dan proses produksi, faktor-faktor teknis produksi antara lain : syarat-syarat produksi (spesifik menurut komoditas/usaha), bahan penolong dan harga, input produksi lainnya dan harga, standarisasi produk. Hal lain yang diperlukan adalah kendala dalam teknis produksi dan cara penyelesaiannya

f. Aspek manajemen dan organisasi

Cakupan analisis dalam aspek manajemen dan organisasi tergantung skala usaha yaitu usaha mikro, kecil atau menengah. Hal penting dalam aspek ini adalah ketersediaan tenaga sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam usaha ini, struktur organisasi, sistem pembayaran dan besarnya gaji/upah serta pengorganisasian produksi.

g. Aspek keuangan

Hal-hal yang dibahas dalam aspek ini antara lain adalah :

- Pemilihan pola usaha (skala & teknologi produksi, jadwal produksi),
- asumsi dan parameternya,
- komponen biaya investasi dan biaya operasional,

- perhitungan kebutuhan modal sendiri dan kredit bank untuk modal kerja awal dan investasi,
- proyeksi produksi dan pendapatan,
- proyeksi laba/rugi dan BEP,
- proyeksi arus kas dan perhitungan kelayakan usaha, analisis sensitivitas.

Untuk usaha mikro perlu ditambahkan analisis ekonomi rumah tangga untuk menghitung kemampuan debitur mengembalikan kredit. Analisis ini membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan dan neraca dari usaha dan rumah tangga pengusaha.

h. Aspek risiko dan jaminan

Faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan kegagalan usaha dan pencegahan risiko serta perumusan langkah-langkah yang perlu diantisipasi untuk keluar dari masalah tersebut. Analisis aspek risiko meliputi 2 hal yaitu risiko usaha dan risiko kredit. Hal penting dalam analisis risiko adalah :

- Risiko kegagalan teknologi dan produksi
- Risiko kegagalan penjualan sehingga proyeksi pendapatan tidak tercapai
- Risiko ketidakmampuan manajerial
- Risiko bahan baku, bahan penolong dan material lainnya
- Risiko musim dan cuaca (bukan bencana alam) yang mempengaruhi siklus produksi
- Risiko legalitas usaha

Analisis aspek jaminan meliputi jenis dan sumber jaminan antara lain asuransi kredit, asuransi jiwa dan bentuk-bentuk jaminan lainnya dan persyaratannya serta cara pengikatan jaminan.

i. Aspek sosial ekonomi dan lingkungan

Yang dibahas dalam aspek sosial ekonomi dan lingkungan adalah :

- Keterkaitan ke depan dan ke belakang (*Forward* dan *backward linkages*) dari pembiayaan bank kepada usaha-usaha tersebut ditingkat lokal dan nasional,
- dampak positif dan negatif terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan pengembangan usaha ini serta polusi yang ditimbulkan.
- Adakah pelaksanaan usaha berpengaruh terhadap aspek-aspek tersebut dan bagaimana cara mengatasinya ?

j. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan kelayakan usaha ditinjau dari semua aspek yang diteliti dan sensitivitasnya serta saran-saran untuk pelaksanaan proyek.

k. Lampiran - lampiran

1. Perhitungan aspek keuangan : Asumsi dan parameternya, biaya investasi, biaya operasional, proyeksi produksi dan pendapatan, perhitungan angsuran kredit, proyeksi biaya dan pendapatan, proyeksi laba/rugi, proyeksi arus kas dan analisis kelayakan usaha, proyeksi arus kas untuk analisis sensitivitas.
2. Data teknis produksi yang digunakan : Jadwal produksi, komposisi dan parameter data teknis untuk komoditi/usaha tertentu yang digunakan dalam analisis keuangan.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu.

KEBUTUHAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN ATAU PROPOSAL KREDIT

Proposal kredit, termasuk proposal agribisnis pada dasarnya hampir sama dengan studi kelayakan, namun pembahasannya tidak mendalam dan tidak menyeluruh seperti pada studi kelayakan. Pada proposal kredit, biasanya aspek yang terutama ditonjolkan adalah aspek pemasaran dan analisis finansial. Selain itu tergantung pula pada skala atau tingkatan usaha, biasanya untuk usaha pada tingkatan mikro cukup dengan membuat proposal saja, tapi untuk usaha atau proyek skala kecil dan menengah ke atas harus menyusun suatu studi kelayakan lebih dahulu. Sebagai contoh untuk dana pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), biasanya pinjaman sebesar Rp 500 juta atau lebih diwajibkan menyusun studi kelayakan, namun dibawah jumlah itu cukup dengan membuat suatu proposal saja.

Perbedaan suatu proposal kredit dengan suatu studi kelayakan adalah antara lain terletak pada kedalaman pembahasan setiap aspek yang mempengaruhi kelayakan suatu usaha atau proyek dan tingkat atau skala usaha tersebut. Penyusunan proposal dapat dilakukan dengan merujuk pada Model Kerangka Penyusunan Studi Kelayakan yang telah diuraikan di atas dengan pembahasan yang lebih sederhana (tidak terlalu mendalam), kecuali uraian mengenai analisis finansial harus jelas dan lengkap.

PENUTUP

Pemberdayaan Masyarakat dan KUKM hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu: belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator dan dapat tercipta saling belajar dan berbagi pengalaman. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan UMKM baik yang bersifat *technical asistant* (TA) maupun yang non TA harus diupayakan adanya koordinasi dan berbagi peran antar *stakeholder* agar optimal hasilnya.

Untuk itu diperlukan analisis pemenuhan kebutuhan dan *needs assessment* yang tepat bagi usaha pemberdayaan masyarakat untuk UKM. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan cara mendorong terjadinya partisipasi masyarakat sasaran, antara lain melalui: identifikasi potensi, analisis kebutuhan, rencana kerja bersama, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan UMKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya. Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat *bottom up* ternyata partisipasi UMKM untuk pemberdayaan diri mereka sendiri akan berhasil dan pada gilirannya secara intergral akan mampu memberikan dampak perkembangan bagi perekonomian wilayah.

BAHAN BACAAN

- Andrianus Mooy (1990). Masalah Strategi, Perkreditan dan Pelayanan Perbankan. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta.
- Gittinger, Price, J. (1986). Economic Analysis of Agriculture (Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian). UI- Press-Johns Hopkins, Jakarta.
- Kadariah (1986). Evaluasi Proyek, Analisa Ekonomis. Edisi dua, LPEE – Universitas Indonesia, Jakarta.
- , Lien Karlina, Clive Gray (1978). Pengantar Evaluasi Proyek. LPEE – Universitas Indonesia, Jakarta.
- The World Bank (1992), Indonesia : Agricultural Transformation Challenges and Opportunities, Report No.10504-IND, Washington DC. USA.
- Zulkarnaen Djamin (1984), Perencanaan & Analisa Proyek, LPFE–Universitas Indonesia, Jakarta.

Saifuddin Sarief, E. (1995/1996), Penyusunan Proposal dan Studi Kelayakan Agribisnis. Program Inkubator Agribisnis. Kerjasama Deptan-Badan Agribisnis dan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.